

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI PROPINSI RIAU PADA MASA
OTONOMI DAERAH (TAHUN 2004-2011)**

TESIS



Oleh :

MARWOTO SAIMAN
NIM. 82316

Tesis Ini Ditulis Sebagai Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

**PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

Abstract

Marwoto Saiman, 2011. Education Policy in Riau Province during Regional Autonomy (2004-2011). Thesis of Post Graduate Program, the State University of Padang.

The purpose of his present research was know and describe education policy in Riau Province during regional autonomy and explain problems faced in making policy in the field of educational in Riau Province during regional autonomy. Qualitative research was used to achieve the objective.

Documentation related to education policy, and interview were used to collect the data of the research. The respondents of the research were educators, education observers, teachers, headmasters as local governments and legislators. The collected data were analyzed to draw conclusion as stade by Louis Gosttschlk.

The research result showed that education policy in Riau Province during regional autonomy especially toward policy effectiveness in allocation budged by Riau Province government was not effective in the field of education development through Provincial budged of Riau Province (APBD). This condition influences the result expected from education implementation toward output produce by education institutions in Riau Province. Lack of qualified human resources in implementation education, limitation of budged in education, lack of education facilities needed by the community especially in remote areas and villages, and School Based Management is not applied yet by district/city government in Riau Province.

It is suggested tha government of Riau Province need to put priority on education field to increase the quality of human resources in Riau Province, coordinate with district and city government in carrying out education to get direction and general policy of education in Riau Province which is harmonious and suitable with the vicians of Riau Province government, one of them is to eradicate stupidity.

ABSTRAK

Marwoto saiman, 2011. Kebijakan Pendidikan di Riau Pada Masa Otonomi Daerah (Tahun 2004-2011). Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Pembangunan di bidang pendidikan membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran guna mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah yang ada di Propinsi Riau. Kebijakan di bidang pendidikan sebelum dan sesudah otonomi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dimana pada masa sebelum otonomi daerah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, namun setelah bergulirnya otonomi daerah, kebijakan dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pembangunan di bidang pendidikan. Setelah era otonomi berjalan, kebijakan pendidikan di Propinsi Riau belum ditetapkan payung hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah atau peraturan lainnya tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Propinsi Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah Tahun 2004-2011 dan Menjelaskan dan memaparkan Kendala yang dihadapi dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah Tahun 2004-2011. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, dan wawancara dengan informan penelitian dalam hal ini adalah tokoh pendidikan, pemerhati pendidikan dan juga dari kalangan guru atau kepala sekolah. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan proses yang terus menerus yang dimulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, dengan menggunakan metode sejarah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis Gosttschlk (1957:32) metode sejarah adalah proses menguji, menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kebijakan pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah, selama ini khususnya terhadap efektifitas kebijakan dalam pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Riau belum menunjukkan adanya kebijakan yang lebih efektif, dalam hal ini mengalokasikan anggaran dalam APBD Propinsi Riau untuk pembangunan di bidang pendidikan. Kondisi ini akan mempengaruhi hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan terhadap *out-put* yang dihasilkan oleh dunia pendidikan di Propinsi Riau. Kemudian ditemukan Kendala yang dihadapi dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah adalah, belum tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam penyelenggaraan pendidikan, adanya keterbatasan anggaran dalam pembiayaan pendidikan, fasilitas pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di daerah pelosok atau desa terpencil, dan belum diterapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah di setiap pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Riau.

**Persetujuan Komisi
Ujian Tesis Magister Kependidikan**

N a m a

Tanda Tangan

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
(Ketua)

Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum.
(Sekretaris)

Dr. Lindayanti, M.Hum
(Anggota)

Dr. Buchari Nurdin, M.Si.
(Anggota)

Dr. Jasrial, M.Pd.
(Anggota)

**Nama Mahasiswa : MARWOTO SAIMAN
NIM : 82316
TANGGAL UJIAN : 15 AGUSTUS 2012**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul : **“KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI PROPINSI RIAU PADA MASA OTONOMI DAERAH”**.

Tesis ini merupakan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd. M.Hum selaku Pembimbing II, yang juga telah banyak mencurahkan pikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. Lindayanti, M.Hum, Bapak Dr. Buchari Nurdin, M.Si dan Dr. Jasril, M.Pd sebagai anggota Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis.
4. Bapak Rektor Universitas Padang dan Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, beserta staf yang telah banyak membantu penulis baik selama masa perkuliahan maupun pada masa penyelesaian tugas akhir.
5. Pemerintah Propinsi Riau, khususnya Dinas Pendidikan Propinsi Riau yang telah banyak memberikan data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Teman-teman seangkatan dengan penulis yang telah banyak melakukan diskusi dalam perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir.

7. Buat keluarga penulis, istri dan anak-anak yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri serta bagi peningkatan khasanah ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT, membalas budi baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amin

Padang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian tentang Pendidikan	11
B. Konsep Otonomi Daerah.....	14
C. Desentralisasi Pendidikan	18
D. Manajemen dalam Dunia Pendidikan	23
E. Kajian tentang Perumusan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan	24
F. Kajian Tentang Kualitas dan Kinerja Dalam Proses Pembelajaran	37
G. Penelitian yang Relevan.....	40
H. Kerangka Konseptual	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Penggunaan Metode Sejarah.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
 BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Riau.....	58
2. Program Dinas Pendidikan Propinsi Riau.....	58
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Riau.....	59
4. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau.....	61

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Propinsi Riau.....	63
B. Temuan Khusus Penelitian.....	68
1. Kebijakan Pendidikan di Propinsi Riau pada Masa Otonomi Daerah	68
a. Efektifitas Kebijakan di Bidang Pendidikan.....	71
b. Kecukupan Kebijakan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.....	74
c. Pemerataan Kebijakan dalam Pemberdayaan Sekolah di Propinsi Riau.....	77
d. Responsivitas Masyarakat terhadap Kebijakan di Bidang Pendidikan di Provinsi Riau.....	79
e. Ketepatan Kebijakan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Propinsi Riau.....	80
2. Kendala yang dihadapi dalam Menetapkan Kebijakan di Bidang Pendidikan di Propinsi Riau pada masa Otonomi Daerah	82
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia	83
b. Keterbatasan Anggaran	88
c. Kurangnya Fasilitas Pendukung.....	91
d. Belum Terlaksananya Koordinasi antara Dinas Propinsi dengan Dinas Daerah	93
C. Pembahasan.....	94
1. Kebijakan Pendidikan Di Propinsi Riau Pada Masa Otonomi Daerah Tahun 2004-2011.....	94
a. Meningkatkan Akses Pendidikan.....	97
b. Meningkatkan Mutu Pendidikan.....	101
c. Mengembangkan Pendidikan Berwawasan Keunggulan dan Teknologi	103
d. Meningkatkan Manajemen Pendidikan	104
e. Meningkatkan Jaringan Kerja Sama Pendidikan Secara Regional, Nasional dan Internasional	106
f. Meningkatkan Monitoring Dan Evaluasi.....	109
2. Kendala yang dihadapi dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah	100
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Indikator Kebijakan.....	37
2. Banyaknya Sekolah Di Propinsi Riau Tahun 1995/1996 hingga Tahun 1999/2000	53
3. Jumlah Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau menurut Kabupaten/Kota di Propinis Riau Tahun 2008/2009.....	54
4. Jumlah Siswa di Propinsi Riau menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Tahun 2005/2009	55
5. Anggaran Pendidikan di Propinsi Riau melalui dana APBN dan APBD dari tahun 2006-2009.....	55
6. Index Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2008.....	56
7. Alokasi Anggaran Pendidikan di Propinsi Riau melalui dana APBN dan APBD dari tahun 2006-2009.....	72
8. Jumlah Pendidikan Formal menurut Kabupaten/Kota di Propinis Riau Tahun 2008/2009.....	75
9. Target dan Realisasi Kebijakan Pengadaan Guru di Provinsi Riau Tahun 2004/2005 – 2009/2010	85
10. Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Sekolah yang ada di Propinsi Riau.....	86
11. Jumlah Guru Bantu Di Propinsi Riau Tahun 2005-2007	87
12. Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Propinsi Riau	88
13. Alokasi Anggaran Pendidikan di Propinsi Riau 2009-2011	90
14. Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2011	92
15. Kebijakan Umum Pembangunan di Bidang Pendidikan Tahun 2009-2013	96
16. Jumlah Pendidikan Non Formal dan Informal menurut Kabupaten/Kota di Propinis Riau Tahun 2010	98

17. Jumlah PKBM menurut Kabupaten/Kota di Provisis Riau Tahun 2010.....	99
18. Jumlah Lembaga Kursus menurut Kabupaten/Kota di Provisis Riau Tahun 2010	100
19. Jumlah Guru izin Belajar S1 dan Bea Siswa S2 dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun 2010/2011	103
Jumlah Sekolah yang berstatus R	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi dewasa ini, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan pemerintah dalam menuangkan suatu peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dan mengupayakan setiap daerah mempunyai kemandirian dalam meletakkan konsep dasar pembangunan daerahnya masing-masing, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Dengan diberlakukan Undang-Undang yang melahirkan sistem otonomi daerah tersebut di atas, masyarakat luas menaruh harapan besar terhadap implementasi dari otonomi daerah yang telah diberlakukan di setiap daerah di Indonesia. Otonomi daerah yang berarti memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan hak otonom bagi setiap daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk memudahkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan, serta pembagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, ini adalah sebuah pilihan yang dianggap tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disamping lebih proporsional dalam distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menentukan kebijakan publik, penguasaan aset ekonomi dan politik, serta pengaturan sumber daya yang ada pada setiap daerah.

Semua jajaran pemerintahan dewasa ini, sedang berada dalam derasnya arus pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah, yang pada hakekatnya bermuara pada upaya untuk memberdayakan daerah termasuk masyarakat daerah dalam segala aspek pelayanan dalam bidang pemerintahan. Tanpa adanya kemampuan yang memadai dari setiap daerah, maka keberadaan daerah dengan segala kegiatannya akan melahirkan jenis ketergantungan baru bagi pemerintah yang berarti tidak ada kemandirian oleh daerah tersebut.

Pelaksanaan dari otonomi daerah yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan harus diarahkan pada pemberdayaan daerah. Usaha kearah tersebut hanya dapat dicapai dengan baik jika pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada filosofisnya dan pemahaman yang tepat dan benar terhadap konsep kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Upaya pemberdayaan tersebut merupakan fungsi

pemerintahan yakni fungsi pelayanan pemerintahan, pemberdayaan, pengembangan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pemberdayaan yang dimaksud salah satunya pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah.

Pembangunan sumber daya manusia dewasa ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya guna dan tepat guna perlu ditetapkan arah dan kebijakan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkualitas, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, cerdas, kreatif, terampil, profesional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani dan memiliki disiplin yang tinggi.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sebagai fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa tujuan dan fungsi pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan, martabat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia seutuhnya diperlukan tenaga

pengajar yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, juga perlu adanya sinkronisasi setiap kebijakan yang ditetapkan, baik kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dewasa ini lebih dituntut untuk lebih mandiri dalam meningkatkan mutu pendidikan, hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri termasuk pengelolaan dibidang pendidikan.

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi dalam penyelenggaraan pendidikan, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat 1 “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi merupakan urusan skala propinsi yang meliputi;” poin f “Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial”

Penyelenggaraan pendidikan di tiap daerah merupakan suatu sistem yang memproses program pendidikan dan pengajaran dari *in-put* untuk menghasilkan atau *out-put* siswa yang berdaya guna sesuai dengan kebutuhan pangs pasar kerja. Pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan yang baik dan berkualitas dapat menunjang kualitas sumber daya manusia bagi setiap daerah tersebut.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di setiap daerah dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terlibat dalam pengaturan dan

pengelolaan pendidikan sebagai tempat dilaksanakan proses belajar dan mengajar dan menimba ilmu bagi peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan pada era otonomi daerah dewasa ini perlu melibatkan seluruh komponen yang ada demi terwujudnya pendidikan yang dapat mengangkat kemampuan sumber daya manusia di setiap daerah.

Menurut Syaiful Sagala (2009:64) mengatakan bahwa, meskipun perundang-undangan yang mengatur desentralisasi sudah diterbitkan, namun pemerintah masih mencari format organisasi yang dapat mempertegas kewenangan Dinas Pendidikan yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Organisasi Dinas Pendidikan menempatkan pemberdayaan sekolah sesuai perintah UUSPN No. 20 dan PP No. 19 tahun 2005 yang mendorong manajemen Dinas Pendidikan dan manajemen satuan pendidikan lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Meskipun pihak sekolah sudah terbiasa dilakukan secara birokratik, makanya disadari sepenuhnya bahwa mengubah paradigma sekolah menjadi non birokratik bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Otonomi daerah memiliki beberapa keunggulan, tetapi otonomi daerah juga menuntut suatu sistem dan keterampilan yang sangat lebih baik untuk menghadapi tantangan kedepan terutama tantangan globalisasi yang sudah bergulir saat ini. Kesemuanya ini menjadi tanggung jawab para kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan masyarakat, Kepala Dinas, Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD, Dewan Pendidikan untuk meningkatkan in-put

daerah ke dalam proses produksi pendidikan berikut pengalokasian anggaran pendidikan melalui APBD setiap daerah.

Otonomi daerah dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu propinsi yang memiliki hak otonom dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Pemerintah Propinsi Riau. Pemerintah Propinsi Riau berupaya untuk memajukan berbagai bidang pembangunan dengan dasar menetapkan visi Propinsi Riau yakni “Untuk Mewujudkan Propinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu Se-Asia Tenggara pada Tahun 2020 yang Didukung oleh Masyarakat yang Dinamis, Beragama, Sejahtera secara Lahir dan Bathin”.

Mewujudkan visi dari Propinsi Riau tersebut, Pemerintah Propinsi Riau telah menetapkan berbagai kebijakan dan program yakni program pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur yang dikenal dengan program K2I. Upaya yang dilakukan oleh Pemerinrah Propinsi Riau tersebut perlu ditunjang oleh pembangunan dibidang pendidikan yang sesuai dengan program K2I tersebut yakni pemberantasan kebodohan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pada sektor pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di Propinsi Riau dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Propinsi Riau. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, Dinas Pendidikan Propinsi Riau mendukung visi dari Pemerintah Propinsi Riau, dengan menetapkan visi dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau yakni “Terwujudnya

lembaga pendidikan Propinsi Riau yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas, beriman, bertaqwa dan berbudaya, serta memiliki daya saing tahun 2020”

Sebelum lahirnya otonomi daerah jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Propinsi Riau tidaklah begitu cepat pertumbuhannya bila dibandingkan dengan jumlah sarana pendidikan pada masa era otonomi daerah. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh jumlah kabupaten yang relatif sedikit pada masa sebelum otonomi daerah di Daerah Tingkat I Propinsi Riau yakni terdiri dari 7 (tujuh) Daerah Tingkat II (Kabupaten) dan Kotamadya.

Perkembangan pendidikan di Propinsi Riau yang dikelola oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau, mengalami peningkatan yang kurang baik, bahkan ada yang mengalami kemunduran dari jumlah sarana sekolah yang ada. Kondisi ini dapat dimaklumi, dimana setiap kebijakan tersentral pada Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Departemen Pendidikan Nasional, sehingga usulan untuk penambahan sekolah relatif lebih sulit untuk dilaksanakan. Usulan penambahan sarana dan prasarana pendidikan bagi Daerah Tingkat II pada masa orde baru, memiliki birokrasi yang panjang, yakni melalui usulan Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian baru diusulkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, sehingga kebijakan oennambahan sarana pendidikan memakan rangkaian birokrasi yang panjang.

Sejalan dengan perkembangan era reformasi yang melahirkan hak otonom bagi setiap daerah, memberikan perubahan yang cukup baik bagi Pemerintah Propinsi Riau, dalam menetapkan berbagai kebijakan terhadap pembangunan daerah. Salah satu bidang pembangunan daerah yang menjadi kewenangan bagi Pemerintah Propinsi Riau, adalah pembangunan dibidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran guna mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah yang ada di Propinsi Riau. Kebijakan di bidang pendidikan sebelum dan sesudah otonomi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dimana pada masa sebelum otonomi daerah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, namun setelah bergulirnya otonomi daerah, kebijakan dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pembangunan di bidang pendidikan.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas perlu dilihat kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Riau dalam menetapkan berbagai program pembangunan dibidang pendidikan. Kondisi inilah yang menjadi fokus utama dalam kajian dengan judul **“KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI RIAU PADA MASA OTONOMI DAERAH (TAHUN 2004-2011)”**

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan identifikasi masalah penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pendidikan dalam era otonomi daerah di Propinsi Riau. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai;

1. Bagaimana kebijakan pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah Tahun 2004-2011?
2. Kendala apasajakah yang dihadapi dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah Tahun 2004-2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk;

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah Tahun 2004-2011.
2. Menjelaskan dan memaparkan Kendala yang dihadapi dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah Tahun 2004-2011.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai ;

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat secara teoritis dapat dilihat dari segi sejarah memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan pendidikan di Riau, dari segi pendidikan dapat memberikan sumbangan dalam memajukan pendidikan di

Riau dan dari pendekatan ilmiah dapat melahirkan karya tulis yang dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan peneliti lainnya.

2. Manfaat Prkatis.

Sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait dengan masalah pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Propinsi Riau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan di Propinsi Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari temuan dan pembahasan penelitian terhadap kebijakan pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah, maka ditetapkanlah kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kebijakan pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah, selama ini khususnya terhadap efektifitas kebijakan dalam pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Riau belum menunjukkan adanya kebijakan yang lebih efektif, dalam hal ini mengalokasikan anggaran dalam APBD Propinsi Riau untuk pembangunan di bidang pendidikan. Kondisi ini akan mempengaruhi hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan terhadap *out-put* yang dihasilkan oleh dunia pendidikan di Propinsi Riau. Anggaran yang banyak belum juga menjamin efektivitas pendidikan, namun anggaran yang ada dikelola dengan baik dan didukung dengan berbagai sumber daya lainnya, akan menghasilkan pembangunan di bidang pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kondisi ini mempengaruhi hasil yang diperoleh dari kebijakan yang ditetapkan menjadi kurang tepat sasaran, adanya ketidak merataan kebijakan, dan belum terpenuhi kebutuhan pendidikan bagi daerah-daerah terpencil, sehingga menimbulkan respon yang kurang baik terhadap kebijakan yang ditetapkan selama ini oleh Pemerintah Propinsi Riau. Selain dari pada itu Dinas Pendidikan Propinsi Riau

juga membuka akses pendidikan forma, informal dan non formal untuk memajukan pendidikan di setiap kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Riau.

2. Kendala yang dihadapi dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan di Propinsi Riau pada masa otonomi daerah adalah, belum tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam penyelenggaraan pendidikan, adanya keterbatasan anggaran dalam pembiayaan pendidikan, fasilitas pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di daerah pelosok atau desa terpencil, dan belum diterapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah disetiap pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Riau, sehingga kebijakan yang ditetapkan selama ini belum mampu mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan peneliti kemukakan di atas maka peneliti mengajukan beberappa saran penelitian, yakni;

1. Bagi Pemerintah Propinsi Riau perlu menetapkan kebijakan yang meprioritaskan kepentingan dunia pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia di Propinsi Riau dapat ditingkatkan.
2. Pemerintah Propinsi Riau bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu adanya koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga ditemukan arah dan kebijakan umum pendidikan di Propinsi Riau yang serasi dan sesuai dengan visi Pemerintah Propinsi Riau, yang salah satunya adalah memberantas kebodohan.

3. Penerapan kebijakan di bidang pendidikan oleh Pemerintah Propinsi Riau, perlu melibatkan seluruh elemen yang ada, baik pihak swasta maupun masyarakat, untuk berpartisipasi memajukan pendidikan di Propinsi Riau.

DAFTAR RUJUKAN

Dokumentasi;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta : Depdikbud RI

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.

Buku;

Abdurrahmansyah. 2001. *Desentralisasi: Harapan dan Tantangan Bagi Dunia Pendidikan*. Jurnal Studi Agama Millah.

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Achmad Budiyo, M. Irfan, & Yuli Andi. 1998. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Uji Coba Otonomi Daerah*. Jurnal Penelitian Ilmu -Ilmu Sosial, PPS Universitas Brawijaya, 2, 209-218.

Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan. Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Alisjahbana, A.S. 2000. Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Jurnal Analisis Sosial, AKATIGA

Arbi Sanit. Et al. 2000. *Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat Daerah Di Indonesia: Format otonomi daerah masa depan*. Jakarta: Laporan penelitian.

Azyumardi Azra. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa; Studi Kajian Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dodi Nandika. 2007. *Pendidikan Di Tengah Gelombang Perubahan*. Jakarta: LP3ES

Drucker, Peter R. 1995. *The Engenering Theory of Manufacturing*.. New York : Herper & Row terjemahan Johar Maturadi. Jakarta : Divisi PJM